



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019



PENGADILAN TINGGI DENPASAR



Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar
(80000)



(0361) 222952



(0361) 225761



www.pt-denpasar.go.id



ptdps@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan evaluasi pencapaian kinerja dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. LKjIP ini telah sesuai disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta DIKTUM Ketiga Instruksi Presiden Nomor Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 11 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin tahunan yang harus dibuat oleh tiap – tiap satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada instansi vertikal dan juga kepada publik, mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan selama tahun pelaporan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam Perencanaan Strategis yang akan dicapai pada masa berikutnya.

Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu ***“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***

Mengetahui
KETUA

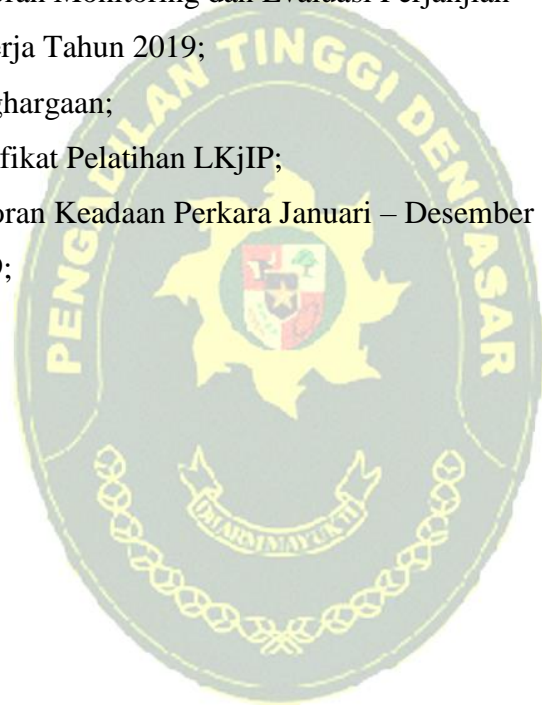
ZAID UMAR BOBSAID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG		
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015 - 2019	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	20
B. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP		
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2019;
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019;
4. Reviu Matriks RENSTRA 2015 – 2019;
5. Rencana Kinerja Tahun 2019;
6. Rencana Kinerja Tahun 2020;
7. Penetapan Kinerja Tahun 2019;
8. Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
10. Penghargaan;
11. Sertifikat Pelatihan LKjIP;
12. Laporan Keadaan Perkara Januari – Desember 2019;



DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	2
Tabel	1.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Tabel	1.3	Rincian Rumah Dinas	5
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	15
Tabel	2.2	Rencana Kinerja Tahun 2019	16
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	18
Tabel	2.4	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
Tabel	3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	22
Tabel	3.2	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	24
Tabel	3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2019	26
Tabel	3.4	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Tahun 2018)	31
Tabel	3.5	Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019	33
Tabel	3.6	Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019	34
Tabel	3.7	Sisa Perkara Pidana Anak Pada Tahun 2018 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019	34
Tabel	3.8	Sisa Perkara Tipikor Tahun 2018 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019	35
Tabel	3.9	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	35
Tabel	3.10	Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019	37
Tabel	3.11	Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019	38
Tabel	3.12	Persentase Penurunan Sisa Perkara	40
Tabel	3.13	Sisa Perkara Tahun 2019	41
Tabel	3.14	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Mengajukan Upaya Hukum	41
Tabel	3.15	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019	42
Tabel	3.16	Jumlah total Perkara Tahun 2019	43
Tabel	3.17	Indek Kepuasan Masyarakat	44
Tabel	3.18	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat	45
Tabel	3.19	Perbandingan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	46

Tabel 3.20	Salinan Putusan Yang dikirim Tepat Waktu	47
Tabel 3.21	One Day Publish	48
Tabel 3.22	Persentase Terpenuhinya Pembayaran Gaji Pegawai	50
Tabel 3.23	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Internal	50
Tabel 3.24	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Eksternal	51
Tabel 3.25	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	52
Tabel 3.26	Daftar Sumber Daya Manusia Per 31 Desember 2019	54
Tabel 3.27	Pelatihan Tahun 2019 Pada Pengadilan Tinggi Denpasar	57
Tabel 3.28	Tabel Perbandingan Realisasi anggaran	59
Tabel 3.29	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019	60
Tabel 4.1	Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I	64
Tabel 4.2	Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II	65
Tabel 4.3	Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III	66



DAFTAR GRAFIK

Grafik	3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	30
Grafik	3.2	Grafik Sisa Perkara Tahun 2018 yang diselesaikan Tahun 2019	31
Grafik	3.3	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	35
Grafik	3.4	Penurunan Sisa Perkara	40
Grafik	3.5	Penurunan Sisa Perkara Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	42
Grafik	3.6	Jumlah Kepuasan Masyarakat	44
Grafik	3.7	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat waktu	47
Grafik	3.8	One Day Publish	49



EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakannya. Memenuhi hal tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar selama 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi dan juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dalam melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Demi mendukung terlaksananya sistem Reformasi Birokrasi pada badan Peradilan, didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi pada Badan Peradilan – pun mengalami perubahan. Dengan adanya Peraturan tersebut, maka jabatan Pimpinan administrasi yang dulu diemban oleh Panitera/Sekretaris, saat ini telah terpisah menjadi Kepaniteraan Peradilan yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan dan Kesekretariatan Peradilan yang dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan, dimana keduanya bertanggung jawab penuh kepada Ketua Pengadilan.

Capaian Kinerja dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan selama tahun 2019 diukur melalui Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang telah berorientasi hasil. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar adalah **sebesar 100,73 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84 %	99 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %	27 %	135 %
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	50 %	52 %	104 %
e. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	3.5	3.09	88 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			105.20 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikriim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			100 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatkannya Pengelolaan Manajerial Lembaga Yang Efektif dan Efisien			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	98%	100%	102%
b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%	96,24%	101%
c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%	79%	83%
d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%	99,62 %	102 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			97%



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Demi mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, maka di Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan telah secara sah telah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu satuan kerja yang berhak mendapat predikat “WILAYAH BEBAS KORUPSI” pada tanggal 10 Desember 2019 di Gedung Bidakara Jakarta yang diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Zaid Umar Bobsaid, SH., MH. yang juga dinobatkan sebagai salah satu pelopor perubahan bersama dengan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebelumnya yang telah memasuki masa purnabakti yaitu I Ketut Gede, SH., MH.

Gambaran umum pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai salah satu garda depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 8 (delapan) Pengadilan Tingkat Pertama yakni : Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Negeri Negara, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Amlapura dan Pengadilan Negeri Bangli.

Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar yang bertempat di Jalan Tantular Barat No. 1 Renon Denpasar dengan luas tanah seluas 3750 m² dengan gedung kantor berlantai dua seluas 1600 m² dan halaman seluas 3669 m², dimana pada Tahun 2016, mendapat dana Belanja Modal berupa pembangunan ruang arsip pada lantai dasar dan ruang pertemuan pada lantai 2, yang terletak pada bagian belakang gedung kantor Pengadilan Tinggi Denpasar seluas 400 m².

Pada lantai 1 Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar, terdapat ruang Sidang Utama, ruang Kepala Bagian Umum dan Keuangan, ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, ruang Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, ruang Sub Bagian Kepegawaian dan TI, ruang Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, ruang Panitera Muda Tipikor, ruang Panitera Pengganti, ruang Panitera Muda Perdata, ruang Panitera Muda Pidana, ruang IT dan ruang Panitera Muda Hukum, juga dilengkapi dengan dapur dan gudang. Pada Lantai 2 terdapat ruang Ketua Pengadilan Tinggi, ruang rapat Ketua Pengadilan Tinggi, 14 (empat belas) ruang Hakim Tinggi, ruang Hakim Adhock Tipikor, ruang Panitera dan ruang Sekertaris, dan juga ruang pertemuan (Aula Pengadilan Tinggi Denpasar).

Berpedoman pada Perma No. 7 Tahun 2015 diatas, maka pada Pengadilan Tinggi Denpasar tipe A dikenal dengan pimpinan 4 (empat) pilar, yakni Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Pengadilan Tinggi, dimana jabatan Panitera dan Sekretaris disetrakan dengan Pejabat Tinggi Eselon IIA. Keadaan pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar disajikan dalam Formasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Denpasar per 31 Desember Tahun 2019, berdasarkan golongan dan jabatan.

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	3
3	Golongan III	45
4	Golongan IV	32
JUMLAH		80

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Tinggi	27
4	Hakim Yustisial	4
5	Hakim Adhock	2
6	Panitera	1
7	Sekretaris	1
8	Panitera Muda Pidana	1
9	Panitera Muda Perdata	1
10	Panitera Muda Hukum	1
11	Panitera Muda Tipikor	1
12	Panitera Pengganti	20
13	Kabag Umum dan Keuangan	1
14	Kabag Perenc dan Kepegawaian	1
15	Kasubag TU dan RT	1
16	Kasubag Keu dan Pelaporan	1
17	Kasubag Renprog dan Anggaran	1
18	Kasubag Kepeg dan TI	1
19	Pengadministrasian Umum/staff	21
JUMLAH		88

Terdapat 27 (dua puluh tujuh) Hakim Tinggi termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 2 (dua) orang Hakim Adhock Tipikor, 4 (empat) orang Hakim Yustisial, 27 (dua puluh tujuh) panitera pengganti termasuk 1 (satu) orang Panitera dan 4 (empat) panitera muda, serta 28 (dua puluh delapan) pegawai yang terdiri dari Sekretaris, 1 (satu) orang, 2 (dua) orang Kepala Bagian, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dan 21 (dua puluh satu) orang pengadministrasian umum.

Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administrasi perkara dan penyelesaian perkara, setiap bagian telah dilengkapi dengan minimal 1 (satu) buah Personal Komputer (PC) pada masing-masing ruangan dan tersedia 62 (enam puluh dua) Lap Top dengan 52 (lima puluh dua) Lap Top dipergunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepala Sub-sub Bagian dan beberapa staf, sedangkan 10 (sepuluh) Lap Top sisanya dilaporkan rusak berat dan sedang menunggu untuk segera dihapuskan.

Mobilitas rutin kantor Pengadilan Tinggi Denpasar didukung dengan 11 (sebelas) unit kendaraan dinas roda 4 yang peruntukannya dipergunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Senior, Humas Pengadilan Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagai operasional. Dimana sebelumnya terdapat 9 (sembilan) kendaraan dinas roda 4, namun sesuai BAST Nomor 02/SLS/SERA/DPS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, Pengadilan Tinggi Denpasar menerima 2 unit Kendaraan Sewa dari TRAC berupa 1 unit Fortuner G Lux 2.4 4x2 AT D 2018 dengan plat nomor B 1901 UJQ dan 1 unit Camry V 2.5 4x2 AT B 2018 dengan plat nomor B 1055 UAH sehingga pada akhir tahun 2018 seluruh Kendaraan Roda 4 pada Pengadilan Tinggi Denpasar berjumlah 11 (sebelas) unit. Selain kendaraan dinas roda 4, terdapat kendaraan dinas roda 2 yang keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) unit yang dipergunakan oleh Panitera Muda dan beberapa pegawai sebagai operasional kantor.

Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar juga dilengkapi dengan fasilitas rumah dinas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Rumah Dinas

NO	URAIAN	LOKASI	PERUNTUKAN	KONDISI
1	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Adiyaksa No. 1. Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar	Rumah Dinas KPT	Baik
2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Nusa Indah Gang XIII No. 5. Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim Tinggi	Rusak Ringan
3	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Singasari No. 29. Kel. Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim Tinggi	Rusak Berat
4	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Saelus No. 5, Kel. Sasetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim Tinggi	Rusak Ringan
5	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Tukad Balian No. 36, Kel. Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Rumah Dinas WKPT	Baik
6	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Tukad Balian No. 36 A, Kel. Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim	Baik
7	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Jl. Muwardi I No. 3, Kel. Sumerta Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Rumah Dinas Panitera	Baik
8	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Jl. Palapa No. 27, Kel. Sasetan, Kec. Denpasar	Rumah Dinas Sekretaris	Baik

		Selatan, Kota Denpasar		
9	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Jl. Palapa No. 28, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim Tinggi	Baik
10.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Jl. Tukad Balian No. 36 B, Kel. Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar	Rumah Dinas Hakim Tinggi	Baik

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka (pada pengertiannya bahwa dalam memutus perkara tidak dipengaruhi oleh siapapun) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Denpasar berfungsi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah Provinsi Bali. Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa, dan Memutus Perkara Banding yang masuk.

Sedangkan fungsi dalam pelaksanaan administrasi adalah :

1. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan perencanaan, kepegawaian dan TI, keuangan dan tata usaha dan rumah tangga.
2. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana, tipikor dan hukum.
3. Menyiapkan program dan evaluasi.
4. Melakukan hubungan masyarakat.
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
6. Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis Pengadilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketua :

- Mengawasi pelaksanaan administrasi keuangan perkara dan penggunaan anggaran yang termuat dalam DIPA.
- Memimpin pertemuan rutin setiap bulan dengan para hakim dan pegawai.
- Melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan tugas – tugas kantor dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh pegawai.
- Menunjuk dan menetapkan hakim pengawas bidang dan hakim pengawas daerah.
- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, di daerah hukumnya.
- Menunjuk majelis Hakim yang menangani perkara masuk ke Pengadilan Tinggi;

2. Wakil Ketua :

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta pelaksanaannya ;
- Mewakili Ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Ketua.
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim Tinggi

- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
- Sebagai Hakim Tinggi Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke masing – masing bidang dan ke Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

4. *Panitera*

Tugas Pokok ialah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Hal tersebut dirinci sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.

5. *Sekretaris*

Tugas pokoknya : melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

Rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tipe A..

6. *Panitera Muda Pidana*

Tugas pokoknya : melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana banding.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana banding.
- Pelaksanaan distribusi perkara pidana banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Pelaksanaan distribusi perkara pidana banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan, Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan pengiriman kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.

7. *Panitera Muda Perdata*

Tugas pokoknya : melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara Perdata.

Rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Perdata Banding.
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan registrasi perkara perdata banding.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimnutasi
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. *Panitera Muda Hukum*

Tugas pokoknya : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. *Panitera Muda Tipikor.*

Tugas pokoknya : Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khususnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus tipikor.
- Pelaksanaan register perkara khusus tipikor.

- Pelaksanaan distribusi perkara khusus tipikor yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus tipikor.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar beserta berkas perkara Bendel A kepada pengadilan pengaju.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. *Panitera Pengganti*

Tugas Pokoknyan ialah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

11. *Kepala Bagian Umum dan Keuangan*

Tugas pokoknya ialah melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Dengan rinciannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

12. *Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian*

Tugas pokoknya ialah melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Dengan rinciannya sebagai berikut :

- Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi , pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan KP, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai , administrasi jabatan fungsional, pengurusan askes dan disiplin pegawai, serta penyusunan Laporan Kepegawaian.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi infomatika dan statistik.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

13. *Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga*

Tugas Pokoknya ialah Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

14. *Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan*

Tugas pokoknya ialah melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

15. *Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran*

Tugas pokoknya ialah melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

16. *Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi*

Tugas pokoknya ialah melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana pengelolaan teknologi informasi dan statistic pemantauan, evaluasi, dokumen, serta penyusunan laporan.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2015 - 2019

A.1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Denpasar

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar.

Visi Pengadilan Tinggi Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI DENPASAR YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Denpasar, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Denpasar;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Denpasar.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan tujuan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Denpasar.

Seiring dengan perkembangan peningkatan sistem administrasi peradilan , maka sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Denpasar – pun melakukan penyesuaian dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan administrasi lembaga yang efektif dan efisien

A.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Maka berdasarkan penetapan tujuan yang telah dijabarkan diatas, Pengadilan Tinggi Denpasar – pun melakukan penyesuaian dalam menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai, yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien.

Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

			dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3.	Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, maka ditetapkanlah sebuah rencana kegiatan tahunan yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	10 %

		11 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	92 %
		12 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	4 (Baik)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas Pegawai	98%
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana kegiatan tahunan merupakan target dan saran yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, berdasarkan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2019, maka Pengadilan Tinggi Denpasar mengeluarkan Penetapan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	10 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	92%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	4 (Baik)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas Pegawai	98%
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%

Dimana dalam proses evaluasi dan monitoring proses penyelesaian perkara selama Tahun 2019, hingga dipandang perlu melakukan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2019, mengingat terjadi perbedaan pedoman dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014 menjadi No. 14 Tahun 2017. Dan juga terdapat kendala – kendala dalam masuknya perkara di akhir tahun yang angkanya cukup signifikan dengan bulan – bulan sebelumnya.

Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2019 di lakukan review pada triwulan IV dengan target sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Perjanjian Kinerja Tahun 2019

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Perdata	85%

		<ul style="list-style-type: none"> - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	20 %
		21 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	92%
		22 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	3.5 (Baik)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas Pegawai	98%
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%

Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut diatas, didukung oleh sejumlah pagu anggaran yang berasal dari DIPA 03 Badan Peradilan Umum dan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2019 dengan rincian pagu anggaran dan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 132.046.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 28.116.148.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp.160.500.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar

A. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini **tidak** dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %	84 %	99 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %	27 %	135 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	50 %	52 %	104 %
		e. Index responden Pengadilan Tinggi Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	3,5 (Baik)	3,09	88 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus	100%	100 %	100 %

Sedangkan untuk Kinerja Utama lainnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	98%	100,48 %	103 %
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%	96,24 %	101 %
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%	79 %	83 %
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%	98,21 %	100 %

Pada tabel diatas pengukuran capaian kinerja diukur dengan rumusan :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara :

NO	SKALA INILAI ORDINAL	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1	>125%	Sangat berhasil	Biru
2	100% - 125%	Berhasil	Hijau
3	75% - 99,99%	Cukup berhasil	Kuning
4	30% - 74,99%	Kurang berhasil	Merah
5	0% - 29,99%	Tidak berhasil	Merah

Pada tabel 3.1 diatas juga terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni tergolong baik, adapun hal-hal yang tidak memenuhi target akan dianalisa pada bagian analisa dalam Bab ini.

A. 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85,5%	87%	84 %	101 %	102 %	99 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20%	7%	16%	27 %	70 %	160 %	135 %

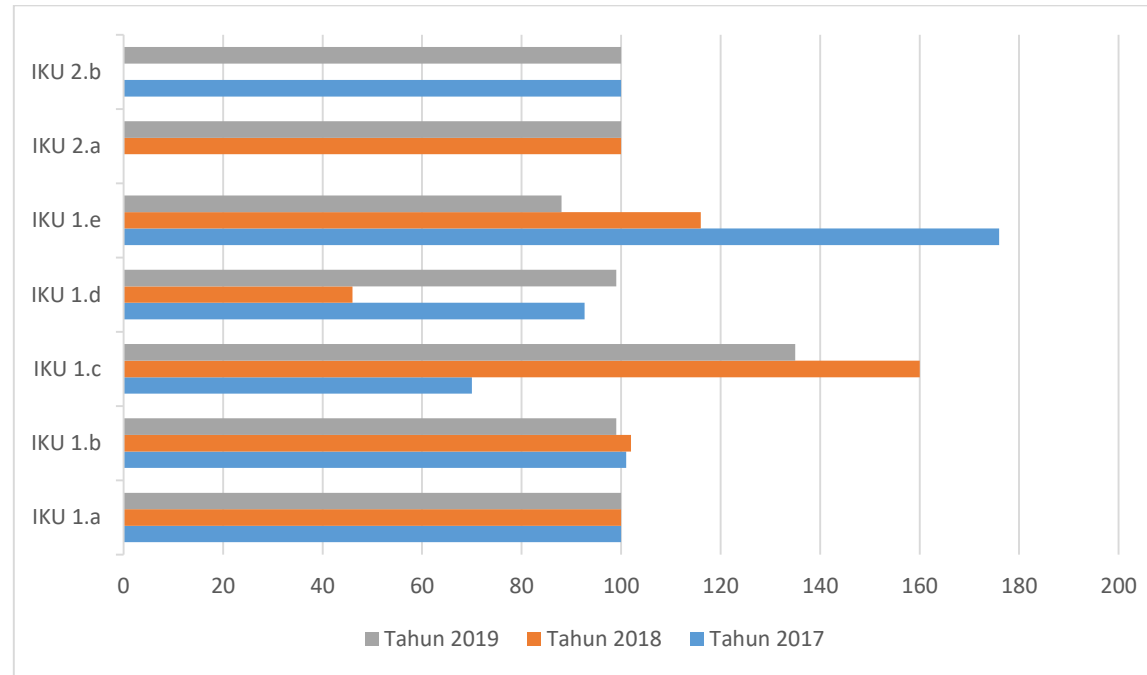
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		d. Persentas e perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ➤ Kasasi ➤ PK	50 %	92,63%	15,6%	19,8 %	92,63 %	46 %	99 %
		e. Indeks responden Pengadilan Negeri se – Bali yang puas terhadap layanan PT Bali	Indeks = 3,5 (Baik)	4,40 (Baik)	4,65 (Baik)	3,09 (Baik)	176 %	116 %	88 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				CAPAIAN (%)		
			2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirm ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	x	100%	100 %	x	100%	100 %	
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				CAPAIAN (%)		
			2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
3	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga yang Efektif dan Efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	98 %	x	99,5%	100 %	x	102%	100%	
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95 %	x	90 %	96,24 %	x	95 %	101 %	
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95 %	x	92 %	79 %	x	101,5 %	83 %	
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98 %	x	99 %	98,21 %	x	101 %	100 %	

Dan apabila di sajikan dalam grafik, maka capaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar periode Tahun 2017 hingga Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja



A. 3. Analisa Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tertuang pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Tinggi Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka terdapat beberapa indikator kinerja utama yakni terdiri dari:

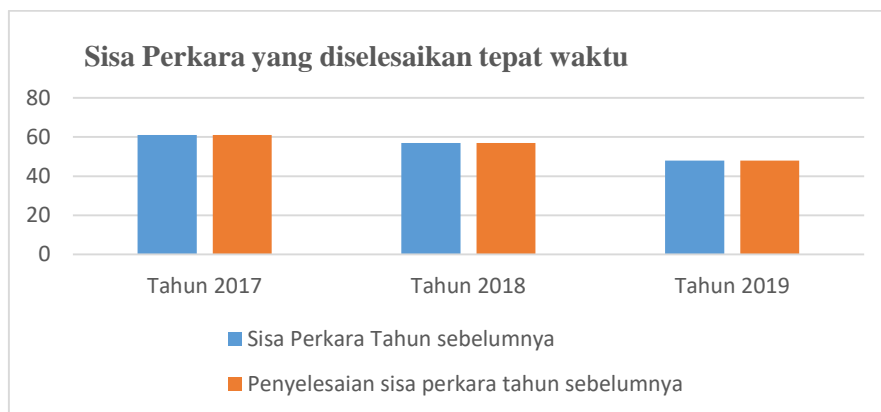
INDIKATOR KINERJA KE-1 : PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU:

Tabel 3.4 Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Sisa Perkara Tahun 2018)

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sehingga bila ditampilkan dalam sebuah grafik untuk penyelesaian sisa perkara adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2 Grafik Sisa Perkara Tahun 2018 yang diselesaikan Tahun 2019



Pada tabel diatas, terlihat capaian dalam persen terkait sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 mencapai **100%**. Sisa perkara merupakan perkara yang masuk pada tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun bersangkutan sehingga masuk menjadi tanggungan perkara masuk pada tahun berikutnya yakni Tahun 2019.

Presentasi sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu yakni 100 % didapat dari rumusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

maka:

$$\frac{48}{48} \times 100 \% = 100\%$$

Analisa : Terdapat 48 sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada akhir tahun yakni antara bulan akhir bulan November hingga bulan Desember Tahun 2018 dan baru dapat diputus pada tahun 2019.

Dari target yang ditetapkan sebesar 100 % dan realisasi mencapai 100 %, maka target penyelesaian Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan, **tercapai** .

Solusi : dari adanya sisa perkara tersebut yakni penyelesaian perkara telah sesuai dengan batas waktu penyelesaian perkara yakni maksimal 3 (tiga) bulan dari batas waktu pendaftaran perkara. Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian sisa perkara tahun lalu Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal penyelesaian sisa perkara tepat waktu dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami hambatan, terlihat pada perbandingan tabel diatas, yakni capaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir senilai 100% artinya sisa perkara diselesaikan tepat waktu.

Perincian sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 pada kepaniteraaran perdata, pidana dan tipikor dapat ditelaah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

NO	KODE KLASIFIKASI	NO. PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PUTUS
	1A6	Perkara No : 171/Pdt/2018/PT. Dps	11 Oktober 2018	09 Januari 2019
2	1B5	Perkara No : 172/Pdt/2018/PT. Dps	15 Oktober 2018	07 Januari 2019
3	1B5	Perkara No : 173/Pdt/2018/PT. Dps	15 Oktober 2018	03 Januari 2019
4	5	Perkara No : 176/Pdt/2018/PT. Dps	15 Oktober 2018	14 Januari 2019
5	1B5	Perkara No : 178/Pdt/2018/PT. Dps	18 Oktober 2018	14 Januari 2019
6	1B1	Perkara No : 180/Pdt/2018/PT. Dps	23 Oktober 2018	09 Januari 2019
7	1B5	Perkara No : 182/Pdt/2018/PT. Dps	29 Oktober 2018	11 Januari 2019
8	5B	Perkara No : 183/Pdt/2018/PT. Dps	29 Oktober 2018	18 Januari 2019
9	1B5	Perkara No : 185/Pdt/2018/PT. Dps	2 Nopember 2018	30 Januari 2019
10	5	Perkara No : 187/Pdt/2018/PT. Dps	2 Nopember 2018	15 Januari 2019
11	5	Perkara No : 190/Pdt/2018/PT. Dps	8 Nopember 2018	16 Januari 2019
12	5	Perkara No : 191/Pdt/2018/PT. Dps	8 Nopember 2018	10 Januari 2019
13	1B5	Perkara No : 192/Pdt/2018/PT. Dps	8 Nopember 2018	30 Januari 2019
14	1A2	Perkara No : 193/Pdt/2018/PT. Dps	8 Nopember 2018	17 Januari 2019
15	5	Perkara No : 194/Pdt/2018/PT. Dps	13 Nopember 2018	07 Januari 2019
16	1B5	Perkara No : 197/Pdt/2018/PT. Dps	15 Nopember 2018	12 Pebruari 2019
17	1B5	Perkara No : 198/Pdt/2018/PT. Dps	19 Nopember 2018	16 Januari 2019
18	1B5	Perkara No : 199/Pdt/2018/PT. Dps	16 Nopember 2018	07 Pebruari 2019
19	1A5	Perkara No : 200/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	29 Januari 2019
20	2A8	Perkara No : 201/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	18 Pebruari 2019
21	1B5	Perkara No : 202/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	22 Januari 2019
22	1B5	Perkara No : 203/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	30 Januari 2019
23	3	Perkara No : 204/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	17 Januari 2019
24	2A11	Perkara No : 205/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	03 Januari 2019
25	5	Perkara No : 206/Pdt/2018/PT. Dps	28 Nopember 2018	20 Pebruari 2019
26	1B5	Perkara No : 207/Pdt/2018/PT. Dps	29 Nopember 2018	22 Januari 2019
27	1B5	Perkara No : 208/Pdt/2018/PT. Dps	29 Nopember 2019	27 Pebruari 2019
28	1A6	Perkara No : 209/Pdt/2018/PT. Dps	04 Desember 2018	28 Januari 2019
29	1B5	Perkara No : 210/Pdt/2018/PT. Dps	10 Desember 2018	19 Pebruari 2019
30	1B5	Perkara No : 211/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	28 Januari 2019
31	1B5	Perkara No : 212/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	13 Pebruari 2019
32	1B5	Perkara No : 213/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	27 Pebruari 2019
33	1B5	Perkara No : 214/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	29 Januari 2019
34	5B	Perkara No : 215/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	1 Maret 2019
35	1B1	Perkara No : 216/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	8 Pebruari 2019
36	3	Perkara No : 217/Pdt/2018/PT. Dps	11 Desember 2018	28 Pebruari 2019
37	1A1	Perkara No : 218/Pdt/2018/PT. Dps	13 Desember 2018	21 Pebruari 2019
38	1B5	Perkara No : 219/Pdt/2018/PT. Dps	21 Desember 2018	18 Pebruari 2019
39	1B5	Perkara No : 220/Pdt/2018/PT. Dps	28 Desember 2018	11 Pebruari 2019

Dengan kode klasifikasi perkara dan jumlah yang dikelola sebagai sisa perkara tahun lalu adalah :

1.	1A1	= Jual Beli	= 1 perkara
2.	1A2	= Sewa Menyewa	= 1 perkara
3.	1A5	= Harta Bersama	= 1 perkara
4.	1A6	= Ganti Rugi	= 2 perkara
5.	1B1	= Penyerobotan	= 2 perkara
6.	1B5	= Sertifikat/Girik	= 20 perkara
7.	2A8	= Perjanjian Borongan	= 1 perkara
8.	2A11	= Jual Beli	= 1 perkara
9.	3	= Perbuatan Melawan Hukum	= 2 perkara
10.	5	= Perceraian	= 6 perkara
11.	5B	= Hak Asuh Anak	= 2 perkara

Tabel 3.6 Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang Diselesaikan Pada Tahun 2019

NO	KODE KLASIFIKASI	NO. PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PUTUS
1	45	Perkara No 58/Pid/2018/PT Dps	08 Nopember 2018	14 Januari 2019
2	45	Perkara No.59/Pid/2018/PT Dps	08 Nopember 2018	14 Januari 2019
3	45	Perkara No.62/Pid Sus/2018/PT Dps	16 Nopember 2018	07 Januari 2019
4	43	Perkara No.65/Pid Sus/2018/PT Dps	22 Nopember 2018	15 Januari 2019
5	1V	Perkara No.67/Pid/2018/PT Dps	03 Desember 2018	16 Januari 2019
6	43	Perkara No.68/Pid Sus/2018/PT Dps	03 Desember 2018	28 Januari 2019
7	17	Perkara No.69/Pid Sus/2018/PT Dps	21 Desember 2018	11 Pebruari 2019
8	1T	Perkara No.70/Pid Sus/2018/PT Dps	21 desember 2018	14 Pebruari 2019
9	45	Perkara No.71/Pid/2018/PT Dps	28 Desember 2018	25 Pebruari 2019

Dengan kode klasifikasi perkara dan jumlah yang dikelola sebagai sisa perkara tahun lalu adalah :

1.	1T	= Penganiayaan	= 1 perkara
2.	1V	= Pencurian	= 1 perkara
3.	17	= Informasi dan transaksi elektronik	= 1 perkara
4.	43	= Imigrasi	= 2 perkara
5.	45	= Lain – Lain	= 4 perkara

**Tabel 3.7 Sisa Perkara Pidana Anak
Tahun 2018 yang Diselesaikan Pada Tahun 2019**

NO	KODE KLASIFIKASI	NO. PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PUTUS
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**Tabel 3.8 Sisa Perkara Tipikor
Tahun 2018 yang Diselesaikan Pada Tahun 2019**

NO	KODE KLASIFIKASI	NO. PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	TANGGAL PUTUS
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

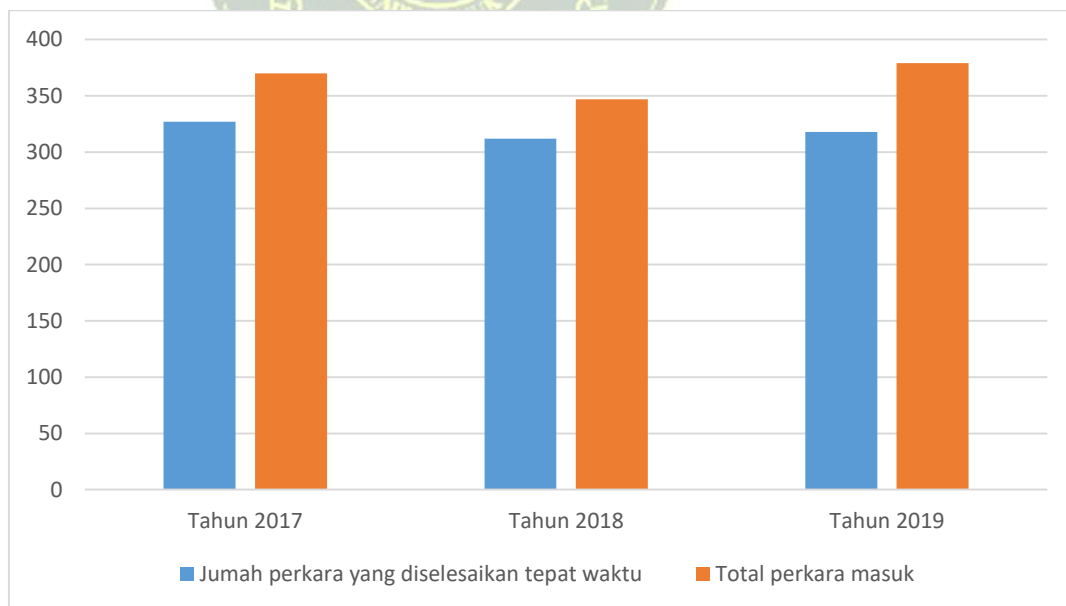
INDIKATOR KINERJA KE-2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU :

Tabel 3.9 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
85%	85,5%	87%	84 %	101 %	102 %	99 %

Dan apabila ditampilkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Grafik 3.3 Grafik Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yakni perkara yang menjadi sisa awal tahun ditambah dengan perkara yang masuk. Sehingga penyelesaian perkara yang tepat waktu merupakan penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Denpasar yakni sebesar **84 %** didapat dari rumusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100 \%$$

maka:

$$\frac{318}{48 + 331} \times 100 \% = \mathbf{84\%}$$

Dengan perhitungan :

Sisa perkara Perdata Tahun 2018	= 39 perkara
Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2018	= 9 perkara
Sisa perkara Pidana Anak Tahun 2018	= 0 perkara
Sisa perkara Pidana Tipikor Tahun 2018	= 0 perkara
Total	= 48 perkara
Perkara Perdata masuk Tahun 2019	= 241 perkara
Perkara Pidana Biasa masuk Tahun 2019	= 85 perkara
Perkara Pidana Anak masuk Tahun 2019	= 4 perkara
Perkara Pidana Tipikor masuk Tahun 2019	= 1 perkara
Total	= 331 perkara
Perkara Perdata putus Tahun 2019	= 232 perkara
Perkara Pidana Biasa putus Tahun 2019	= 81 perkara
Perkara Pidana Anak putus Tahun 2019	= 4 perkara
Perkara Pidana Tipikor putus Tahun 2019	= 1 perkara
Total	= 318 perkara

Analisa : terjadinya pelimpahan berkas pada bulan September 2019 sebanyak 55 (limapuluh lima) berkas perkara perdata dari Pengadilan Negeri Denpasar yang mengakibatkan penumpukan jumlah perkara di akhir tahun .

Dari target yang ditetapkan sebesar 85 % dan realisasi mencapai 84 %, maka target penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, ***tidak tercapai*** .

Solusi : terkait dengan tidak bolehnya pengadilan menolak suatu perkara, maka perkara yang masuk ke tingkat banding di penghujung tahun akan menjadi sisa perkara pada tahun itu dan diselesaikan pada tahun berikutnya.

Pengadilan Tinggi Denpasar sepanjang Tahun 2019 telah menyelesaikan putusan perkara dari total perkara sebanyak 318 perkara, artinya **84 %** perkara telah diselesaikan tepat waktu dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

NO	BULAN	PERKARA PERDATA							
		GUGATAN				PERMOHONAN			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	39	12	25	26	-	-	-	-
2	Februari	26	13	17	22	-	-	-	-
3	Maret	22	16	6	32	-	-	-	-
4	April	32	15	15	32	-	-	-	-
5	Mei	32	15	23	24	-	-	-	-
6	Juni	24	20	13	31	-	-	-	-
7	Juli	31	13	17	27	-	-	-	-
8	Agustus	27	4	15	16	-	-	-	-
9	September	16	55	10	61	-	-	-	-
10	Oktober	61	29	29	61	-	-	-	-
11	Nopember	61	26	36	51	-	-	-	-
12	Desember	51	23	26	48	-	-	-	-
TOTAL JUMLAH			241	232		-	-	-	-

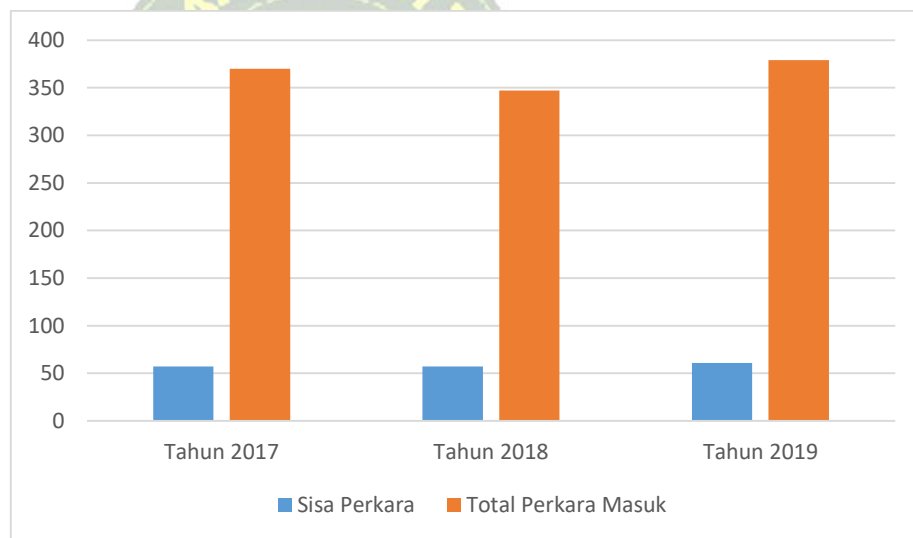
Tabel 3.11. Keadaan perkara Pidana Tahun 2019

NO	BULAN	PIDANA BIASA & PIDANA ANAK				TIPIKOR			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	9/-	7/3	7/1	9/2	-	-	-	-
2	Februari	9/2	2/1	7/3	4/-	-	-	-	-
3	Maret	4/-	8/-	4/-	8/-	-	-	-	-
4	April	8/1	8/-	6/-	10/-	-	-	-	-
5	Mei	10/-	11/-	9/-	12/-	-	-	-	-
6	Juni	12/-	5/-	6/-	11/-	-	-	-	-
7	Juli	11/-	1/-	10/-	2/-	-	-	-	-
8	Agustus	2/-	2/-	2/-	2/-	-	-	-	-
9	September	2/-	15/-	1/-	16/-	-	-	-	-
10	Oktober	16/-	6/-	12/-	10/-	-	1	1	-
11	Nopember	10/-	13/-	10/-	13/-	-	-	-	-
12	Desember	13/-	7/1	7/1	13/-	-	-	-	-
JUMLAH AKHIR TAHUN		-	85/4	81/4	13/-	-	1	1	-

INDIKATOR KINERJA KE -3 : PRESENTASE PENURUNAN SISA PERKARA**Tabel 3.12 Persentase Penurunan Sisa Perkara**

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
20 %	7%	16%	27 %	70 %	160 %	135 %

Apabila ditampilkan dalam sebuah grafik, maka :

Grafik 3.4 Grafik Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Denpasar diperhitungkan dengan menggunakan rumusan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

$T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

T_n : sisa perkara tahun 2018 sebanyak **48** perkara

$T_{n.1}$: sisa perkara tahun 2019 sebanyak **61** perkara

Maka :

$$\frac{(61-48)}{48} \times 100\% = 27\%$$

Dengan rincian sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2019 yakni :

Tabel 3.13. Sisa perkara Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2018	MASUK TAHUN 2019	PUTUS TAHUN 2019	SISA TAHUN 2019
1	Perdata	39	241	232	48
2	Pidana Biasa	9	85	81	13
3	Pidana Anak	0	4	4	0
4	Pidana Tipikor	0	1	1	0
		48	331	318	61

Analisa : Terdapat peningkatan Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2019 yakni sebesar 27% dimana pencapaian Tahun 2018 adalah 16% sedangkan di tahun 2017 sebesar 7%. Nilai pencapaian ini diperoleh dikarenakan sisa perkara Tahun 2019 lebih besar dari Tahun 2018, sehingga walaupun terjadi peningkatan persentase namun kinerja penyelesaian perkara belum dapat terpenuhi dikarenakan banyaknya perkara masuk di bulan Oktober 2019 yakni 55 perkara perdata yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Dari target yang ditetapkan sebesar 20 % dan realisasi mencapai 27 %, maka target penyelesaian Penurunan Sisa Perkara, melampaui target yang ditetapkan.

Solusi : Tetap melakukan evaluasi keadaan perkara per triwulan dan memutus perkara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

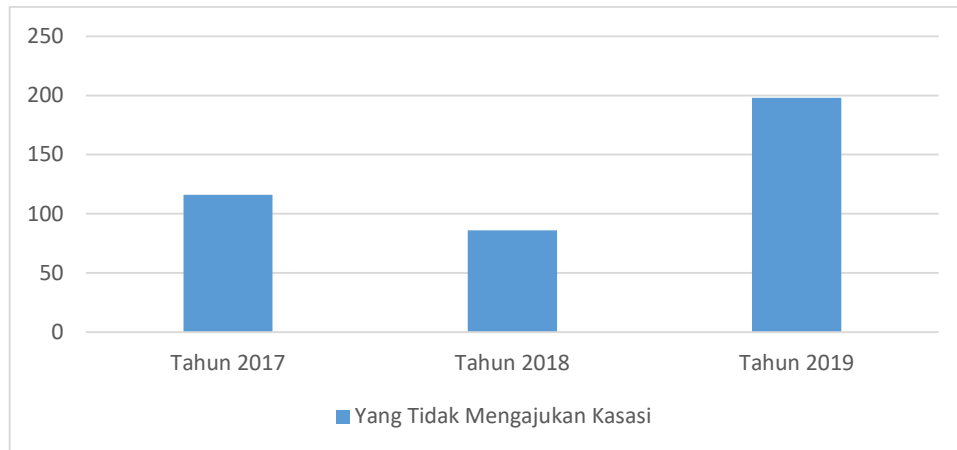
INDIKATOR KINERJA KE-4 : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Tabel 3.14 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
50 %	92,63%	15,6%	52 %	92,63%	46%	104 %

Dimana apabila data tersebut disajikan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5 Grafik Penurunan Sisa Perkara Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Dalam Penyelesaian suatu perkara, para pihak memiliki hak dalam mengajukan upaya hukum, Pengadilan Tinggi Denpasar mendata presentasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum sesuai dengan rumusan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Maka:

$$\frac{198}{379} \times 100\% = 52 \%$$

Dengan rincian tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

NO	WILAYAH KERJA	MENGAJUKAN BANDING	MENGAJUKAN KASASI	YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI
1	Pengadilan Negeri Denpasar	122	35	122
2	Pengadilan Negeri Singaraja	37	22	15
3	Pengadilan Negeri Gianyar	27	21	6

4	Pengadilan Negeri Tabanan	49	26	23
5	Pengadilan Negeri Negara	22	13	9
6	Pengadilan Negeri Semarang	10	4	6
7	Pengadilan Negeri Amlapura	16	7	9
8	Pengadilan Negeri Bangli	13	5	8
	TOTAL	8155	8257	198

Tabel 3.16. Jumlah Total Perkara Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	PERKARA MASUK 2019	SISA PERKARA TAHUN 2018	
1	Perdata	241	39	
2	Pidana	89	9	
3	Pidana Tipikor	1	0	
	TOTAL	331	48	379

Analisa : Terjadi peningkatan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik ke tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali pada Tahun 2019, yang menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan telah merasa menemukan keadilan-nya pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah puas menerima hasil keputusan Majelis Hakim.

Dari target yang ditetapkan sebesar 50 % dan realisasi mencapai 52 %, maka target penyelesaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, **melampaui target yang ditetapkan** .

Solusi : Rasa keadilan pada setiap orang berbeda – beda dan para pihak memiliki hak mengajukan upaya hukum lanjutan, menjadikan tantangan bagi Hakim-Hakim khususnya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menghasilkan produk hukum berupa putusan yang lebih baik lagi.

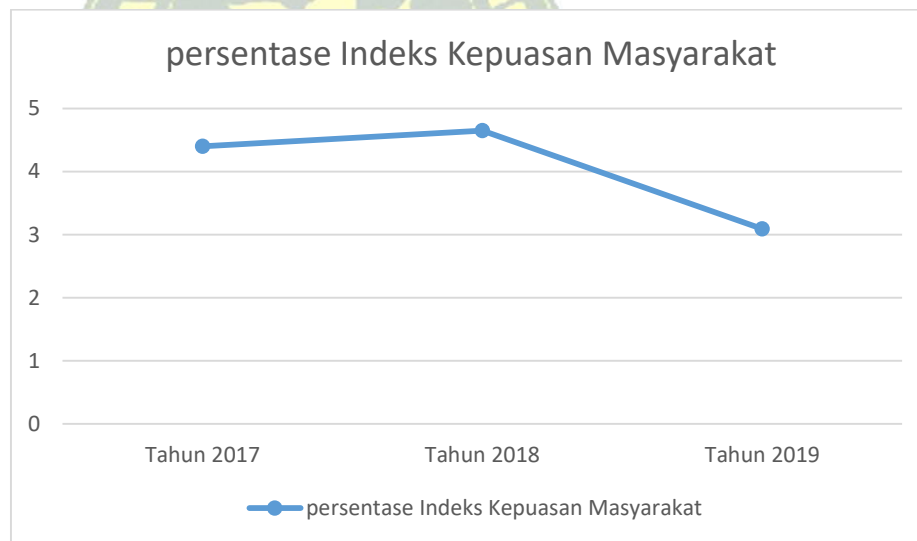
INDIKATOR KINERJA KE-5 : INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tabel 3.17 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indeks = 3,5 (Baik)	4,40 (Baik)	4,65 (Baik)	3,09 (Baik)	176 %	116 %	88 %

Apabila disajikan dalam bentuk grafik, maka sebagai berikut :

Grafik 3.6 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Pelanggan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Pelanggan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar melaksanakan survei kepuasan pelanggan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama sebagai responden.

Berikut hasil perbandingan survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 :

Tabel 3.18. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	IKM TAHUN 2018 (PERMENPAN 16/2014)		IKM TAHUN 2019 (PERMENPAN 14/2017)	
	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Pemberian informasi dan penjelasan terkait permintaan data baik bidang kepaniteraan atau kesekretariatan terhadap satuan kerja	4,75	Persyaratan Pelayanan	3,53
2	Pelayanan dan pemberian informasi terhadap keluhan satuan kerja	4,62	Prosedur Pelayanan	3,52
3	Keputusan pimpinan dalam mempromosikan salah satu karyawan untuk menduduki jabatan tertentu	4,5	Waktu Pelayanan	4,14
4	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis kepaniteraan dan kesekretariatan yang selama ini dilakukan Pengadilan Tinggi Denpasar	4,75	Biaya/Tarif	4,46
5	Mengenai pengawasan rutin yang dilakukan Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap satuan kerja secara periodik	4,63	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,32
6	-	-	Kompetensi Pelayanan	3,90
7	-	-	Perilaku Pelaksana	3,42
8	-	-	Maklumat Pelayanan	3,40
9	-	-	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,51
	TOTAL NILAI IKM THN 2018	4,65	TOTAL NILAI IKM THN 2019	3,09

Analisa : terjadi penurunan nilai indeks Kepuasan Masyarakat, dimana pada Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Denpasar mendapatkan nilai 4,40 (Baik) menjadi 3,09 (Baik) di Tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena pada Tahun 2018 indeks Survey Kepuasan Pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 sedangkan pada Tahun 2019 mengacu pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dari target yang ditetapkan sebesar 3,5 dan realisasi yang di mencapai sebesar 3,09 maka target perhitungan Index Responden Pengadilan Tinggi yang puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi , *tidak sepenuhnya tercapai* .

Solusi : dikarenakan terjadi perbedaan acuan dalam melaksanakan perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat antara Tahun 2019 dan tahun sebelumnya yakni Tahun 2018, maka kedua IKM tersebut tidak dapat disandingkan sebagai bahan perbandingan. Sehingga yang menjadi penyanding adalah penilaian pada Tahun 2019 yang dilaksanakan di 2 (dua) semester dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, dan terlihat bahwa penilaian pada semester 2 mengalami kenaikan dari semester 1 Tahun 2019.

Tabel 3.19. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019

NO	IKM TAHUN 2019 SEMESTER 1		IKM TAHUN 2019 SEMESTER 2	
	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	3,14	Persyaratan Pelayanan	3,53
2	Prosedur Pelayanan	3,18	Prosedur Pelayanan	3,52
3	Waktu Pelayanan	2,96	Waktu Pelayanan	4,14
4	Biaya/Tarif	2,90	Biaya/Tarif	4,46
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,06	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,32
6	Kompetensi Pelayanan	2,73	Kompetensi Pelayanan	3,90
7	Perilaku Pelaksana	3,36	Perilaku Pelaksana	3,42
8	Maklumat Pelayanan	3,06	Maklumat Pelayanan	3,40
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,24	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,51
	TOTAL NILAI IKM SEMESTER 1 THN 2019	3,07	TOTAL NILAI IKM SEMESTER 2 THN 2019	3,09



Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tugas pokok utama pengadilan adalah penanganan perkara, maka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diukur melalui 2 indikator utama yakni:

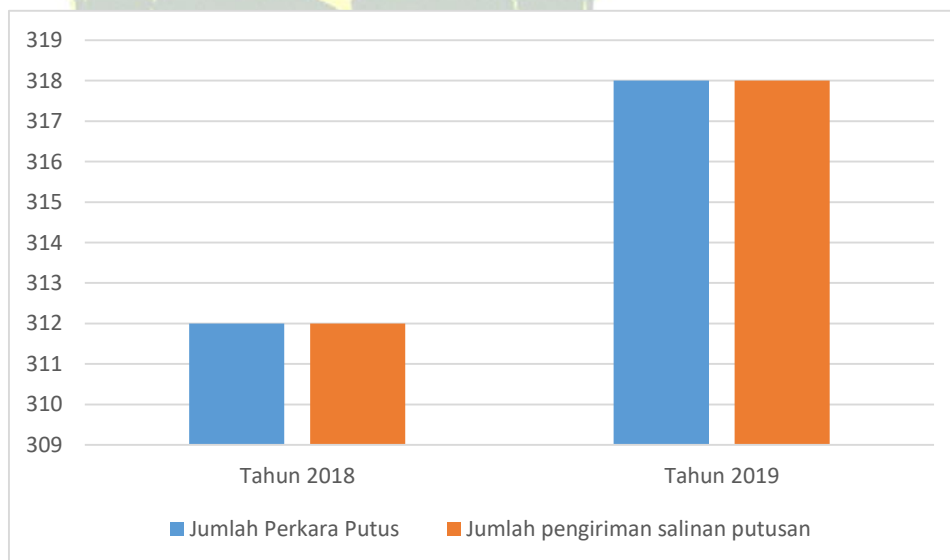
INDIKATOR KINERJA KE – 1 : PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Tabel 3.20 Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
100 %	x	100 %	100 %	x	100 %	100 %

Apabila disajikan dalam bentuk grafik, maka sebagai berikut :

Grafik 3.7 Grafik Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu



Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu merupakan gambaran bahwa adanya kepastian hukum yang diberikan kepada para pihak. Dalam hal perhitungan presentase indikator ini, digunakan rumus sesuai dengan Mahkamah Agung yakni:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan dalam rentan waktu Januari s.d Desember Tahun 2019 :

$$\frac{318}{318} \times 100\% = 100\%$$

Analisa : Maka dari hasil perhitungan diatas didapat 100% yang artinya Pengadilan Tinggi Denpasar selalu mengirimkan putusan tepat waktu kepada pengadilan pengaju.

Sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100 % dan realisasi yang dicapai juga mencapai 100 %, maka target penyelesaian Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju , tercapai .

INDIKATOR KINERJA KE- 2 : PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS

Tabel 3.21 One Day Publish

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %

Apabila disajikan dalam bentuk grafik, maka sebagai berikut :

Grafik 3.8 Grafik One Day Publish

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus, dalam perhitungannya menggunakan rumusan dari Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

Maka :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Analisa : Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam web (direktori putusan dan SIPP) adalah sebanyak 1 perkara, begitupula dalam proses penyelesaian perkara ketika putus langsung di upload di website (one day minut)

Dari target yang ditetapkan sebesar 100 % dan realisasi yang di capai juga mencapai 100 %, maka target penyelesaian Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Putus, ***tercapai*** .

Solusi : Untuk selalu menjaga ketepatan penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan One Day Minut yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.



Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA KE – 1 : PERSENTASE TERPENUHINYA PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DEMI MENDUKUNG PRODUKTIVITAS PEGAWAI

Tabel 3.22 Persentase Terpenuhinya Pembayaran Gaji Pegawai

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
98 %	x	99.55	100	x	102 %	102 %

Analisa : Terdapat pergerakan jumlah mutasi masuk dan mutasi keluar, dan beberapa tunjangan seperti Tunjangan ke -14 bagi Hakim Adhock Tipikor yang tidak diperhitungkan pada saat awal penganggaran dikarenakan menunggu juknis pelaksanaan pembayarannya. Sehingga mengakibatkan pergerakan pembayaran gaji Pegawai maupun Hakim tidak dapat di prediksi secara pasti hingga akhir tahun, dan juga memerlukan proses yang cukup lama dalam pengusulan anggaran.

Dari target yang ditetapkan sebesar 98 % dan realisasi yang dicapai sebesar 100 %, maka target penyelesaian Pembayaran Gaji Pegawai, tercapai .

Solusi : Melakukan pengajuan revisi pagu minus paling lambat di bulan Agustus, untuk memperhitungkan kekurangan pembayaran sebelumnya dan prediksi pembayaran hingga akhir Desember.

INDIKATOR KINERJA KE – 2 : PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN INTERNAL SATUAN KERJA

Tabel 3.23 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Internal

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
95 %	x	90	96.24	x	95 %	101 %

Analisa : Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dengan realisasi senilai 96,24% untuk belanja internal atau yang pada bagan anggaran disebut dengan belanja operasional, dengan target yang ditetapkan adalah senilai 95 %, maka Pengadilan Tinggi Denpasar telah mampu melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan baik.

Dari target yang ditetapkan sebesar 95 % dan realisasi yang dicapai sebesar 96,24 %, maka target penyelesaian Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Internal Satuan Kerja, **tercapai** .

Solusi : Memaksimalkan tingkat penyerapan yang ada dengan melakukan review berkala per – triwulan dengan lebih intensif, untuk memantau pergerakan realisasi anggaran

INDIKATOR KINERJA KE – 3 : PERSENTASE TERPENUHINYA PENCAPAIAN TARGET DAN PELAYANAN EKSTERNAL OLEH SATUAN KERJA

Tabel 3.24 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Eksternal

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
95 %	x	92 %	79 %	x	101.5 %	83 %

Analisa : Angka penyerapan anggaran untuk pelayanan eksternal atau pada bagan anggaran disebut belanja non operasional sebesar 79 %, jauh di bawah rata – rata dari target yang ditetapkan disebabkan adanya kendala eksternal pada proses penganggaran itu sendiri. Terjadi penambahan anggaran senilai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan Symposium International Reform Policy yang realisasi utamanya adalah untuk memfasilitasi kegiatan belanja barang yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Namun anggaran tersebut dikeluarkan pada belanja non operasional dengan akun perjalanan dinas, sehingga menyulitkan satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar untuk merealisasikan belanja yang telah dikeluarkan, sehingga terjadilah tingkat penyerapan yang rendah untuk belanja non operasional tersebut.

Sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 95 % dan realisasi yang di capai sebesar 79 %, maka target penyelesaian Pencapaian Target dan Pelayanan Eksternal Oleh Satuan Kerja, **tidak tercapai** .

Solusi : Menyikapi kemungkinan terulangnya kejadian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar memohon kepada Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI, agar tetap

mengalokasikan dananya di eselon 1 dan pertanggungjawabannya dibantu oleh satuan kerja pelaksana seperti halnya kegiatan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil.

INDIKATOR KINERJA KE – 4 : PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PENGADILAN

Tabel 3.25 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Pendukung

TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
98 %	x	99 %	98.21%	x	101 %	100 %

Analisa : Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dengan realisasi senilai 98,21% untuk kebutuhan sarana prasarana pendukung atau yang pada bagan anggaran disebut dengan belanja modal, dengan target yang ditetapkan adalah senilai 98 %, maka Pengadilan Tinggi Denpasar telah mampu melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan baik.

Pada Tahun 2019, Pengadilan Tinggi Denpasar mengelola anggaran Belanja Modal senilai Rp.160.500.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk pengadaan Laptop bagi para Hakim Tinggi guna menunjang aktifitas pengelolaan perkara. Dan juga pengadaan TV LCD untuk menunjang pelaksanaan E- Court.

Dari target yang ditetapkan sebesar 98 % dan realisasi yang dicapai sebesar 98,21 %, maka target Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Pengadilan, **tercapai** .

Solusi : Memaksimalkan tingkat penyerapan yang ada dengan melakukan review berkala per – triwulan dengan lebih intensif, untuk memantau pergerakan realisasi anggaran

A. 4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi maupun institusi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan dampak dalam menggerakkan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien.

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam mengelola 331 (tiga ratus tiga puluh satu) perkara yang masuk dan sebanyak 48 (empat puluh delapan) sisa perkara Tahun 2018, didukung oleh 10 Majelis Hakim dan 24 (dua puluh empat) panitera pengganti yang membantu dalam penyelesaian perkara. Dimana apabila dilakukan perhitungan, maka masing – masing Majelis Hakim mengelola sedikitnya 2 perkara dalam sebulan sehingga dalam pengelolaan manajemen perkara tidaklah terlalu tinggi tingkat aktivitasnya.

Namun pengelolaan manajemen perkara tidaklah hanya sampai pada pembagian perkara yang dilakukan tepat waktu. Berbagai kendala yang muncul selama penyelesaian sebuah proses perkara terkadang datang dari internal para stakeholder. Misalnya saja apabila terdapat pemanggilan Pelatihan bagi para Hakim Tinggi maupun ketika dipanggil sebagai mentoring oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, menjadi salah satu kendala ketika melakukan musyawarah pengambil keputusan sebuah perkara.

Namun dengan adanya hal diatas, selama Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Denpasar selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga tidak menjadi suatu kendala yang terlalu berarti dalam manajemen perkara. Lain hal nya ketika terdapat jumlah masuk yang sangat menumpuk dalam 1 (satu) periode tertentu seperti halnya pada Bulan Oktober 2019 dimana sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara perdata dilimpahkan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini cukup membebaskan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pelaksanaan manajemen perkara mendekati akhir Tahun 2019 dengan target penyelesaian perkara adalah 3 (tiga) bulan, sehingga bulan ke – 3 (tiga) jatuh tepat bulan Desember ataupun lebih tergantung kelengkapan berkas pada saat pendaftaran.

Dengan segala permasalahan yang muncul, Pengadilan Tinggi selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja Badan Peradilan dalam mengupayakan hasil akhir perkara yang dapat dipertanggungjawabkan keadilannya. Sehingga yang menjadi tolak ukur paling utama yang dipegang adalah ketika memutuskan sebuah perkara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Sedangkan faktor eksternal seperti pelimpahan berkas di akhir tahun sehingga membuat sisa perkara menjadi tinggi, tidak dapat dijadikan tolak ukur yang akurat, karena sebuah lembaga Peradilan

tidak dapat menolak maupun melakukan kontrol terhadap pelimpahan berkas dikarenakan core bisnisnya adalah Pengelolaan Perkara.

Berikut Sumber Daya Manusia yang mendukung terlaksananya sebuah tupoksi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 :

Tabel 3.26 Daftar Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ZAID UMAR BOBSAID, S.H.,M.H.	Ketua	
2.	IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
3.	I NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
4.	I MADE SUJANA, S.H.	Hakim Tinggi	
5	TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
6	MADE NGURAH ATMADJA, S.H.	Hakim Tinggi	
7	ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	
8	I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
9.	HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
10	IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	
11.	NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
12.	I NYOMAN SUKRESNA, S.H.	Hakim Tinggi	
13.	SUBYANTORO, S.H.	Hakim Tinggi	
14.	BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
15.	ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	
16	H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
17.	SUDARWIN, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
18.	I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
19	Dr. LILIK MULYADI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
20.	SUNARDI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
21.	Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	
22.	TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
23	H. SUMPENO, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
24	PUDJIASTUTI HANDAYANI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
25	Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
26.	SUJATMIKO, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	
27	I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	

28	SUTARTO, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	
29	Dr. DJANIKO M.H.GIRSANG, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	
30	SUHARTANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
31	A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H.	Hakim Yustisial	
32	I WAYAN MERTA, S.H.,M.H.	Hakim Yustisial	
33	DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, S.H.,M.H.	Hakim Yustisial	
34	I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum.	Hakim Yustisial	
35	Dr. IHAT SUBIHAT, S.H.,M.H.	Hakim Adhock Tipikor	
36	Drs.H. MOH. PUGUH HARYOGI, S.H.,Sp.N.	Hakim Adhock Tipikor	

37	I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.	Panitera	
38	TJAHYONO, S.H.	Sekretaris	
39	ABDIAMAN DAMANIK, S.H.	Panitera Pengganti	
40	MADE SUKADANA, S.H.	Panitera Pengganti	
41	I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
42	I GEDE IRIANA, S.H.,M.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	
43	I MADE SUDANA, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
44	I KETUT SUMADHI, S.H.	Panitera Muda Perdata	
45	DRA. LUH GEDE ARSANI	Panitera Pengganti	
46	KADEK ARIANI, S.H.	Staf	
47	A.A ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.	Panitera Pengganti	
48	DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.	Panitera Pengganti	
49	DEWA KETUT SUPARDI, SH	Panitera Pengganti	
50	SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.	Panitera Pengganti	
51	LUH MADE SILAWATI, S.H.	Panitera Pengganti	
52	PUTU AYU HERAWATI, S.H.	Panitera Pengganti	
53	I MADE RIKA, S.H.	Panitera Pengganti	
54	WAYAN RAHADIAN, S.H.	Panitera Pengganti	
55	IDA PUTU SUDIKA, S.H.	Panitera Pengganti	
56	I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.	Panitera Pengganti	
57	GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.	Panitera Pengganti	
58	NI WAYAN SADIASIH, S.H.	Panitera Pengganti	
59	I PUTU LINGGIH ARTHA, S.H.	Panitera Pengganti	

60	I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum.	Panitera Pengganti	
61	I G N KUSUMA WIJAYA, S.E.,S.H.	Kasub Keuangan dan Pelaporan	
62	NI WAYAN SURYANI, S.E.,S.H.,M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
63	AHMAD ZAIM, S.E.,M.Ak.	Staf	
64	PUTU ESA GUNA SURYAWATI, S.E.,S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
65	I KETUT ARNAWA, S.H.	Panitera Pengganti	
66	I GEDE KARTIKA ARYASA, S.T.	Pranata Komputer	
67	NIRMALA, S.T.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	
68	LUH PUTU HANDAYANI, S.E.,M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	
69	NI LUH PUTU MEITY UTAMI, S.H.	Staf	
70	SI KADEK AYU WIRASETIAWATI, S.E.,M.M.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	
71	I KETUT SUHARSANA, S.Kom.	Pranata Komputer	
72	GEDE AGUS BAYU ANDHYKA, S.H.	Staf	
73	NI GUSTI AYU ARINI	Staf	
74	I KETUT WICARYA,	Staf	
75	I GUSTI AGUNG KEMBARBAWA	Staf	
76	A.A GEDE BAYU DEWANTA, S.H.	Staf	
77	I WAYAN SAPTA BUANA, S.H.	Staf	
78	NI PUTU SRI YAYATI, S.H.	Staf	
79	NI KOMANG SURYANTARI, S.E.	Staf	
80	NI WAYAN SRI LISTIANI, S.H.	Staf	
81	I GUSTI NGURAH ALIT PUJANA, S.H.	Staf	
82	IDA AYU SRI SEMAYAWATI M, S.E.	Staf	
83	I NYOMAN MERTADANA, S.H.	Staf	
84	I S M A I L	Staf	
85	I MADE WINDRA, S.H.	Staf	
86	I KETUT SUWARTA	Staf	

Selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2019 , guna meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, diselenggarakan berbagai pelatihan sebagai berikut :

Tabel 3.27 Pelatihan Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Denpasar

NO	JENIS PELATIHAN/DIKLAT	PESERTA
1	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan	Biro Keuangan Dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung
2	Sosialisasi E-Litigasi Oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung	Dirjen Badilum, Pengadilan Tinggi Denpasar Dan Lingkungan Wilayah Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Denpasar
3	Sosialisasi E-cort dan Media Majemen Pengadilan Tinggi Denpasar	Hakim Tinggi Dan Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi
4	Sosialisasi Hasil Pembinaan Dirjen Badilum Oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar	Hakim Berserta Seluruh Pejabat Pengadilan Tinggi Dps
5	Pembinaan dari Dirjen Badilum Terkait Pencanaan Zona Integritas	Pengadilan Tinggi Denpasar

Data diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Denpasar telah melakukan beberapa upaya / kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia nya. Pengadilan Tinggi Denpasar dalam upaya ini pun untuk tahun berikutnya akan berusaha lebih maksimal dalam pemanfaatan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia sehingga diharapkan bukan saja kantor Pengadilan Tinggi Denpasar yang dapat berkembang tetapi sumber daya manusianya sendiri secara individu dapat meningkatkan kapabilitas.

A.5 . Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan :

- kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN
- pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang makin ketat
- kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik
- SDM aparatur semakin profesional
- *Mind set dan culture set* yang mencerminkan integritas yang makin tinggi

Untuk itu, perlu secara konkret untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program **Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** yang bersifat konkrit.

Pengadilan Tinggi Denpasar terus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di pengadilan, salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas pada seluruh pengadilan.

Upaya Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan performa Pengadilan terutama dalam penegakan Zona Integritas, telah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menganugerahkan Sertifikat “Wilayah Bebas Korupsi” pada tanggal 10 Desember 2019 di Gedung Bidakara Jakarta yang diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H. yang juga dinobatkan sebagai salah satu pelopor perubahan bersama dengan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebelumnya yang telah memasuki masa purnabakti yaitu I Ketut Gede, S.H., M.H.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai target Rencana Kinerja Tahun 2019, Pengadilan Tinggi Denpasar mempergunakan DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, yang dipergunakan untuk membiayai segala kegiatan yang terkait dengan penyelesaian Perkara Pidana maupun Perkara Pidana Tipikor.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase anggaran Pengadilan Tinggi untuk DIPA 03 Badilum pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 51 %. Penurunan ini terjadi dikarenakan tahun anggaran 2018 terjadi penambahan anggaran dari Rp.147.995.000 (Seratus Empat puluh Tujuh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp.258.757.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikarenakan adanya kegiatan Bimbingan Teknis yang diperoleh dari satuan kerja di

bawah Pengadilan Tinggi yang tidak terserap, sehingga dioptimalisasikan untuk kegiatan Bimtek E-Cort.

Secara lebih jelas terlihat rincian penerimaan anggaran terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.28 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	258.757.000,-	241.883.499	93.48
2	2019	132.046.000,-	129.985.293,	98.44

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tanpa menambah/mengurangi pagu anggaran pada DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran yang tidak dapat diserap di beberapa komponen output kegiatan pada DIPA 03 dikarenakan minimnya jumlah perkara Pidana Tipikor yang dikelola selama Tahun Anggaran 2019.

Hal tersebut terjadi pada Output Kegiatan Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Denpasar, dimana target perkara yang ditetapkan sejumlah 21 (dua puluh satu perkara) dengan pagu anggaran senilai Rp.6.547.000,- (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) hanya mampu di realisasi sebanyak 1 (satu) perkara dengan nilai Rp.4.117.000,- (Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Selama Tahun Anggaran 2019 tercatat 1.651 (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Satu) surat di bagian Pidana dan Tipikor yang mempergunakan anggaran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat untuk Pengiriman Salinan Putusan maupun pengiriman surat penahanan dengan total anggaran senilai Rp.9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pengelolaan Perkara Pidana dan senilai Rp.1.560.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pengadilan Tinggi Denpasar selama Tahun Anggaran 2019 juga mengelola Output Kegiatan berupa Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama senilai Rp.83.899.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dimana kegiatan – kegiatan pada output tersebut meliputi :

1. Kegiatan Zona Integritas pada 8 (Delapan) satuan kerja Pengadilan Negeri wilayah Bali senilai Rp.17.070.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

2. Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu pada 8 (Delapan) satuan kerja Pengadilan Negeri wilayah Bali senilai Rp.31.570.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
3. Kegiatan Konsultasi/Koordinasi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dirjen Badilum), untuk melakukan rapat KEKA (Komite Keputusan Akreditasi) dengan Tim Badilum senilai Rp.34.829.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Rincian anggaran DIPA 03 Badilum Tahun Anggaran 2019, tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.29 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019

KODE	URAIAN	PAGU	REVISI 4 PAGU	JUMLAH	SISA DANA	% REALIS ASI
		ANGGARAN	ANGGARAN			
005.03.0 7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	132,046,000	132,046,000	129,985,293	2,060,707	98.44%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	132,046,000	132,046,000	129,985,293	2,060,707	98.44%
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu [Base Line]	53,496,000	48,147,000	46,510,250	1,636,750	96.60%
1049.005 .UV1	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING DI WILAYAH DENPASAR	34,260,000	41,937,000	41,415,750	521,250	98.76%
051	PENCATATAN REGISTER PERKARA BANDING	17,580,000	24,857,000	24,803,250	53,750	99.78%
521211	Belanja Bahan	4,080,000	3,240,000	3,237,100	2,900	99.91%
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	4,080,000	3,240,000	3,237,100	2,900	99.91%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,500,000	21,617,000	21,566,150	50,850	99.76%
	- Alat Tulis Kantor	13,500,000	19,617,000	19,608,650	8,350	99.96%

	- Box khusus perkara	-	2,000,000	1,957,500	42,500	97.88%
052	MINUTASI	4,080,000	1,080,000	1,040,000	40,000	96.30%
521211	Belanja Bahan	4,080,000	1,080,000	1,040,000	40,000	96.30%
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	4,080,000	1,080,000	1,040,000	40,000	96.30%
053	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PENGADILAN PENGAJU	3,000,000	4,000,000	3,764,500	235,500	94.11%
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	3,000,000	3,000,000	2,964,500	35,500	98.82%
	- Pengiriman Salinan Putusan	3,000,000	3,000,000	2,964,500	35,500	98.82%
521113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	1,000,000	800,000	200,000	80.00%
	- Pengiriman Salinan Putusan	-	1,000,000	800,000	200,000	80.00%
054	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN	9,600,000	12,000,000	11,808,000	192,000	98.40%
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	-	5,750,000	5,668,000	82,000	98.57%
	- Pengiriman Salinan Putusan	-	5,750,000	5,668,000	82,000	98.57%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	6,250,000	6,140,000	110,000	98.24%
1049.005.UV2	PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING DI WILAYAH DENPASAR	19,236,000	6,210,000	5,094,500	1,115,500	82.04%
051	PENCATATAN REGISTER PERKARA BANDING	6,547,000	3,620,000	3,617,500	2,500	99.93%
521211	Belanja Bahan	1,050,000	630,000	629,500	500	99.92%
	- Penggandaan dan Penjilidan berkas perkara	1,050,000	630,000	629,500	500	99.92%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,497,000	2,990,000	2,988,000	2,000	99.93%
	- Alat Tulis Kantor	5,497,000	2,000,000	2,031,000	(31,000)	101.55%
	- Box khusus perkara	-	990,000	957,000	33,000	96.67%
052	MINUTASI	1,050,000	420,000	418,000	2,000	99.52%

521211	Belanja Bahan	1,050,000	420,000	418,000	2,000	99.52%
053	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PENGADILAN PENGAJU	1,260,000	720,000	-	720,000	0.00%
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,260,000	270,000	-	270,000	0.00%
	- Pengiriman Surat Penahanan	1,260,000	270,000	-	270,000	0.00%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	450,000	-	450,000	0.00%
	- pengiriman surat penahanan ke Rutan	-	450,000	-	450,000	0.00%
054	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN	1,239,000	1,450,000	555,000	895,000	38.28%
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,239,000	900,000	505,000	395,000	56.11%
	- Pengiriman berkas penahanan	1,239,000	900,000	472,000	428,000	52.44%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	550,000	50,000	500,000	9.09%
	- pengiriman surat penahanan ke Rutan	-	550,000	50,000	500,000	9.09%
1049.009	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara [Base Line]	78,550,000	83,899,000	83,475,043	423,957	99.49%
052	Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	78,550,000	83,899,000	83,475,043	423,957	99.49%
521211	Belanja Bahan	430,000	430,000	350,000	80,000	81.40%
	- ATK	430,000	430,000	350,000	80,000	81.40%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	76,020,000	83,169,000	83,125,043	43,957	99.95%
	> KEGIATAN KONSULTASI/ KOORDINASI KE BADILUM	-	34,829,000	36,717,243	(1,888,243)	105.42 %
	- Kegiatan konsultasi / koordinasi ke Badilum	-	34,829,000	36,717,243	(1,888,243)	105.42 %
	> KEGIATAN ZONA INTEGRITAS PADA 2 PN	-	7,520,000	7,705,000	(185,000)	102.46 %
	- Penginapan [7 ORG x 2 PN x 1 HR x 1 KEG]	-	-	-	-	0.00%
	- Uang Harian [7 ORG x 2 PN x 2 HR x 1 KEG]	-	7,520,000	7,705,000	(185,000)	102.46 %
	> KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PADA 2 PN	43,120,000	17,320,000	16,202,800	1,117,200	93.55%
	- Penginapan [7 ORG x 2 PN x 1 HR x 1 KEG]	16,800,000	7,920,000	7,912,800	7,200	99.91%

	- Uang Harian [7 ORG x 2 PN x 2 HR x 1 KEG]	26,320,000	9,400,000	8,290,000	1,110,000	88.19%
	> KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PADA 5 PN	32,900,000	14,100,000	13,590,000	510,000	96.38%
	- Uang Harian [7 ORG x 5 PN x 1 KEG]	32,900,000	14,100,000	13,590,000	510,000	96.38%
	> KEGIATAN ZONA INTEGRITAS PADA 5 PN	-	9,400,000	8,910,000	490,000	94.79%
	- Uang Harian [7 ORG x 5 PN x 1 KEG]	-	9,400,000	8,910,000	490,000	94.79%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	300,000	-	300,000	0.00%
	- Uang Harian [7 ORG x 2 KEG]	2,100,000	300,000	-	300,000	0.00%
JUMLAH KELELURUHAN		132,046,000	132,046,000	129,985,293	2,060,707	98.44%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2019 tersebut diatas, maka apabila dituangkan dalam tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I						
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	87%	102,35%	85 %	84 %	99 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	16%	160%	20 %	27 %	135 %
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	46%	51,11%	50 %	52 %	104 %
e. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	4	4.65	116,25%	3.5	3.09	88 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			106%			105,2%

Secara keseluruhan, terjadi **penurunan kinerja pada Sasaran Strategis I** dikarenakan dikarenakan banyaknya perkara yang menjadi sisa di akhir Tahun 2019 yakni sebesar 61 perkara dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 48 perkara, dan juga terdapat perbedaan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan cara penilaian dan hasil akhir dari penilaian.

Dari tabel diatas dapat dilihat, terjadi penurunan kinerja senilai 0.80 % dari rata – rata capaian kinerja pada sasaran strategis I di Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018.

Tabel 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II						
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikriim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	100%	105,26%	100 %	100 %	100 %
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	0 % Tidak terdapat perkara menarik perhatian	0 %	100 %	100 %	100 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			106 %			100 %

Secara keseluruhan, terjadi **pencapaian kinerja yang stabil** untuk Sasaran Strategis II di Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018. Walaupun terlihat terjadi penurunan pada rata – rata capaian kinerja, itu dikarenakan penetapan target dibawah dari realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 sehingga dianggap perlu untuk meningkatkan target capaian di Tahun 2019.

Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III						
Meningkatkannya Pengelolaan Manajerial Lembaga Yang Efektif dan Efisien						
Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	95%	98,19%	103%	98%	100%	102%
b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%	94,90%	99.90%	95%	96.24%	101%
c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%	94,90%	99.90%	95%	79%	83%
d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	95%	99,40 %	104 %	98%	99.62 %	102 %
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			101.7 %			97

Terlihat pada tabel diatas, bahwa terjadi **penurunan kinerja pada Sasaran Strategis III** di Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 0.95 %, dikarenakan terjadi penambahan anggaran yang pengalokasiannya tidak sesuai dengan proses pertanggungjawaban anggaran, sehingga target realisasi yang ditetapkan tidak tercapai.

A.1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya SOP yang baik sehingga semua pekerjaan

dapat terdokumentasi dengan baik. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2019 adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Bali.
- c. Terjadi penurunan pengajuan perkara Kasasi di Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa masyarakat telah puas dengan hasil putusan siding yang diberikan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar.

A.2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Denpasar diantaranya adalah :

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember cukup banyak dan cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Tingkat Pertama yang cukup lama.
- b. Tingginya tingkat mutasi Hakim Tinggi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bali dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, menyebabkan turunnya angka kinerja rasio hakim terhadap perkara, dan juga menyebabkan kurangnya jumlah ruangan yang tersedia, sehingga kenyamanan Hakim Tinggi dalam bekerja sedikit berkurang.

B. SARAN - SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- a. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- b. Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- c. Dalam hal Peningkatan Kualitas SDM Pengadilan Tinggi Bali, diharapkan adanya pemanggilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat mengikuti Diklat baik Teknis Yudisial maupun Kesekretariatan.



LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
DENPASAR**

NOMOR : W.24-U/ /KP.01.2/1/2020

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKjIP, PK, IKU, RENSTRA
DAN SATGAS SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

- Membaca** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ;
- b. Bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun laporan.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I bagian Ketiga Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Kepala Badan Pengawasan MA RI No. : 1319/BP/OT.01.2/11/2019 tanggal 27 November 2019 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKjIP,
PK, IKU, RENSTRA DAN SATGAS SAKIP PADA
PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

Kesatu : Menunjuk dan menugaskan tim penyusunan LKjIP, PK, IKU, Renstra dan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Ketua : Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar
Wakil Ketua : Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Khusus Tipikor
5. Ka.Bag Perencanaan dan Kepegawaian

Kedua : Tim bertugas menyusun dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Denpasar dan melakukan penilaian terhadap dokumen SAKIP dari seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai bidang masing - masing serta menguploadnya pada Website Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa laporan diselesaikan tepat pada waktunya .


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : Januari 2020



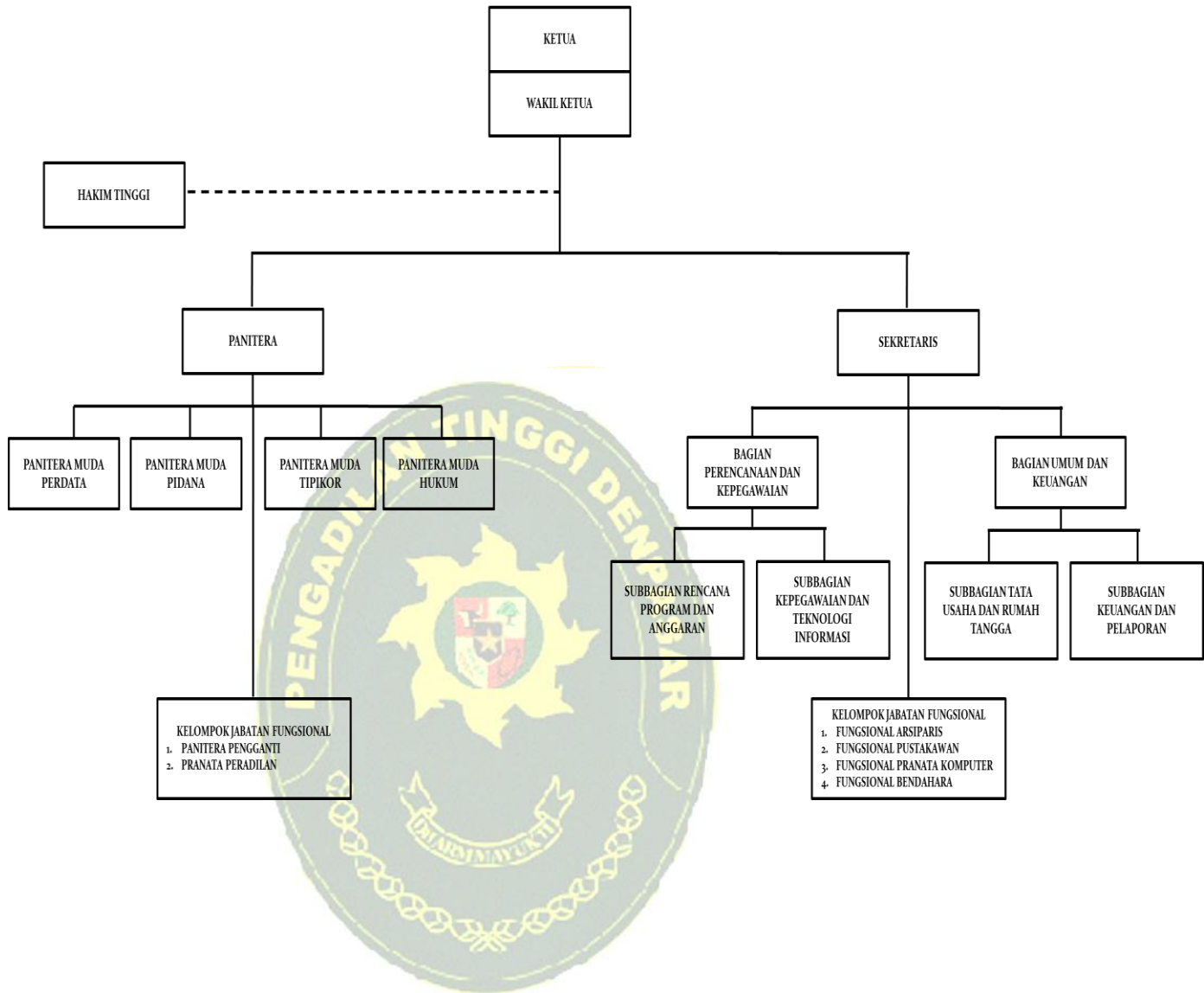
KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR


Zaid Umar Bobsaid



Lampiran 2

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR TIPE A





Lampiran 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Penyelesaian Perkara	Pengaju Tepat Waktu			
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

ZAID UMAR BOBSAID

MATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Visi	:	Terwujudnya Pengadilan Tinggi Denpasar yang Agung																
Misi	:	1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Denpasar																
		2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan																
		3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Denpasar																
		4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Tinggi Denpasar																

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis																
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	Target (%)					Program	Kegiatan	Anggaran							
						2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019			
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Rp.393.400.000,-	Rp.71.031.000,-	Rp.141.000.000,-	Rp.147.995.000,-	Rp.132.046.000,-		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	82	85	85	90										
		Persentase penurunan sisa perkara	90		Persentase penurunan sisa perkara	x	x	10	10	15										
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	95		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	x	x	90	95	95										
		Indeks responden Pengadilan Negeri se-Bali yang puas terhadap layanan PT Bali	5		Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bali	x	x	4	4	5						x	x	Rp.141.000.000,-	Rp.147.995.000,-	Rp.132.046.000,-

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju Tepat Waktu	x	x	95	98	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	x	x	Rp.141.000.000,-	Rp.147.995.000,-	Rp.132.046.000,-
		Persentase putusan yg menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	x	x	100	100	100							
3	Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	95	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	x	95	95	98	100	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan	Rp.20.965.974.000,-	Rp.17.940.779.000,-	Rp.18.999.902.000,-	Rp.24.081.702.000,-	Rp.21.193.328.000,-
		Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95		Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	x	95	95	95	95			Rp.1.006.739.000,-	Rp.951.692.000,-	Rp.1.420.763.000,-	Rp.1.371.893.000,-	Rp.1.559.615.000,-
		Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95		Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	x	95	95	95	95			Rp.394.560.000,-	Rp.585.310000,-	Rp.294.310.000,-	Rp.266.960.000,-	Rp.102.038.000,-
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	95		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	x	90	90	90	95	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.80.000.000,-	Rp.3.544.500.000,-	Rp.762.808.000,-	Rp.338.930.000,-	Rp.117.000.000,-



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

ZAID UMAR BOBSAID



REVIEW RENCANA KINERJA TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor	20 %
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	50 %
		g. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	3,5 (Baik)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	98 %
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95 %
		c. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95 %
		d. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98 %



Denpasar, Januari 2020

Ketua

ZAID UMAR BOBSAID



Lampiran 6

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none">- Perkara Perdata- Perkara Pidana- Perkara Pidana Khusus/Tipikor <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none">- Perkara Perdata- Perkara Pidana- Perkara Pidana Khusus/Tipikor <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <ul style="list-style-type: none">- Perkara Perdata- Perkara Pidana- Perkara Pidana Khusus/Tipikor <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kasasi <p>e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	<p>101 %</p> <p>85%</p> <p>20 %</p> <p>50 %</p> <p>3.5 (Baik)</p>
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p>
3.	Peningkatan Pelayanan Publik	a. Indeks Persepsi Korupsi masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Denpasar	4

		b. Persentase terpenuhinya kegiatan Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama	98%
		c. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	98%



Denpasar, Januari 2020

Ketua

ZAID UMAR BOBSAID



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI DENPASAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **I KETUT GEDE, SH.,M.H**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **HERRI SWANTORO, SH.,M.H**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Denpasar, Januari 2019

Pihak Pertama,

I KETUT GEDE, SH. MH.



Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badilum MA RI

HERRI SWANTORO, SH. MH.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019**


N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Perdata - Perkara Pidana - Perkara Pidana Khusus/Tipikor 	20 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	50 %
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	4 (Baik)

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga yang efektif dan efisien	e. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji pegawai demi mendukung produktivitas pegawai	95%
		f. Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan internal satuan kerja	95%
		g. Persentase terpenuhinya pencapaian target dan pelayanan eksternal oleh satuan kerja	95%
		h. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan Pengadilan	90%

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 147.995.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 25.720.555.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp.338.930.000,-



Direktur Jenderal Badilum MA RI
HERRI SWANTORO, SH. MH.


Denpasar, Januari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Bali

I KETUT GEDE, SH. MH.




Lampiran 8

No	Tujuan		Target PKT	Realisasi Semester I												Capaian Kinerja Semester I (dalam %)						
	Uraian	Indikator kinerja		Jan	dalam (%)	Feb	dalam (%)	Mar	dalam (%)	Apr	dalam (%)	Mei	dalam (%)	Jun	dalam (%)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	25 perkara dari 39 perkara	64.10	14 perkara dari 14 perkara	100.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	6,410	10,000	0	0	0	0	
		- Perkara Pidana (Jumlah Sisa)	100%	8 perkara dari 9 perkara	88.89	1 perkara dari 1 perkara	100.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	8,889	10,000	0	0	0	0	
		- Perkara yang Diselesaikan (Perkara Tipikor)	100%	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0	0	0	0	0	0	0
		- Perkara Perdata yang diselesaikan	85%	25 perkara dari 51 perkara	49.02	17 perkara dari 39 perkara	43.59	6 perkara dari 38 perkara	15.79	15 perkara dari 47 perkara	31.91	23 perkara dari 47 perkara	48.94	13 perkara dari 44 perkara	29.55	5,767	5,128	1,858	3,755	5,757	3,476	
		- Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu (Jumlah Perkara yang)	85%	8 perkara dari 16 perkara	50.00	10 perkara dari 14 perkara	71.43	4 perkara dari 12 perkara	33.33	6 perkara dari 16 perkara	37.50	9 perkara dari 21 perkara	42.86	6 perkara dari 17 perkara	35.29	5,882	8,403	3,922	4,412	5,042	4,152	
		- Perkara Tipikor yang diselesaikan	85%	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0	0	0	0	0	0	0
		- Perkara Perdata yang penurun an sisa perkara (Sisa Perkara Tahun Sebelumnya-Sisa Perkara Tahun Berjalan/)	20%	sisa 26 perkara dari 51 perkara masuk	50.98	sisa 22 perkara dari 39 perkara masuk	56.41	sisa 32 perkara dari 38 perkara masuk	84.21	sisa 32 perkara dari 47 perkara masuk	68.09	sisa 24 perkara dari 47 perkara masuk	51.06	sisa 31 perkara dari 44 perkara masuk	70.45	25,490	28,205	42,105	34,043	25,532	35,227	
		- Perkara Pidana yang penurun an sisa perkara (Sisa Perkara Tahun Sebelumnya-Sisa Perkara Tahun Berjalan/)	20%	sisa 11 perkara dari 16 perkara masuk	68.75	sisa 4 perkara dari 14 perkara masuk	28.57	sisa 8 perkara dari 12 perkara masuk	6.61	sisa 10 perkara dari 16 perkara masuk	62.50	sisa 12 perkara dari 21 perkara masuk	57.14	sisa 11 perkara dari 17 perkara masuk	64.71	34,375	14,286	3,306	31,250	28,571	32,353	
		- Perkara Tipikor yang penurun an sisa perkara (Sisa Perkara Tahun Sebelumnya-Sisa Perkara Tahun Berjalan/)	20%	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0	0	0	0	0	0	0
		- Persentase perkara yang Indeks responden	50%	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0 perkara	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			3.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.07	37.00	0	0	0	0	0	88	

No	Tujuan		Target PKT	Realisasi Semester I												Capaian Kinerja Semester I (dalam %)					
	Uraian	Indikator kinerja		Jan	dalam (%)	Feb	dalam (%)	Mar	dalam (%)	Apr	dalam (%)	Mei	dalam (%)	Jun	dalam (%)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
2	Tervujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	33 perkara	100.00	27 perkara	100.00	10 perkara	100.00	21 perkara	100.00	32 perkara	100.00	19 perkara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase putusan yg menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



Zaid Umar Bobsaid

No	Tujuan		Target PKT	Realisasi Semester II												Capaian Kinerja Semester II						
	Uraian	Indikator kinerja		Jul	dalam (%)	Agust	dalam (%)	Sept	dalam (%)	Okt	dalam (%)	Nov	dalam (%)	Des	dalam (%)	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	28 perkara	100.00	17 perkara	100.00	11 perkara	100.00	42 perkara	100.00	46 perkara	100.00	34 perkara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase putusan yg menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Zaid Umar Bobsaid





Lampiran 9





Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 01 / QMR / SERTIFIKAT / 12 / 2016

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Denpasar Tipe A

Alamat : Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar, Bali

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2019, dengan rencana audit surveillance pada :

- I. Juni 2017
- II. Desember 2017
- III. Juni 2018
- IV. Desember 2018
- V. Juni 2019
- VI. Desember 2019

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu

WAHYUDIN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



HERRI SWANTORO





**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Pengadilan Tinggi Denpasar

Unit kerja ini telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Apabila ditemukan praktek pungutan liar, calo, gratifikasi
dan aduan atas unit kerja ini maka dapat memasukan aduan ke
www.lapor.go.id

Jakarta, 10 Desember 2019

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Tjahjo Kumolo



SERTIFIKAT

diberikan kepada :

Nama : Nirmala, S.T.
NIP : 198103092009042003
Jabatan : Kepala Sub.Bag. Rencana Program dan Anggaran
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Denpasar
Instansi : Mahkamah Agung

Telah mengikuti dengan baik
Program Diklat Teknis Perencanaan Angkatan I
Sejak tanggal 14 s.d. 18 November 2016
Yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Kumdil, Mahkamah Agung RI
bekerjasama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas

Jakarta, 18 November 2016



Kepala
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencana Bappenas
Dr. Nur Hidayati Rahayu, ST, M.Sc
NIP. 19700927 199903 2 005

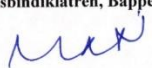


Kepala
Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan,
Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI
Dr. Tin Zuraida, SH, M.Kn
NIP. 19660929 198703 2 002

DAFTAR MATERI DIKLAT TEKNIS PERENCANAAN

NO.	MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN
1	Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana	4
2	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	4
3	Sinkronisasi RPJMN dengan Renstra	4
4	Penyusunan Program dan Kegiatan	4
5	Teknik Penyusunan Pengendalian Program dan Kegiatan Simulasi dan Praktek	4
6	Teknik Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Simulasi dan Praktek	4
7	Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Utama MA Simulasi dan Praktek	4
8	Penyusunan SAKIP	4
9	Simulasi Penyalarsan: RPJMN, RENSTRA, Program dan Kegiatan, serta Praktek	8
Jumlah Total		40

Kepala Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana
Pusbindiklatren, Bappenas



Drs. Hari Nasiri Mochtar, M.Com
NIP. 19631112 199003 1 004

